

Dr. MAHI M. HIKMAT, M.Si.

EDISI
REVISI

KOMUNIKASI POLITIK

DALAM PILKADA LANGSUNG

Teori dan Praktik



DAFTAR ISI

BAB I

PERSEPSI KOMUNIKASI

- A. Definisi Komunikasi
- B. Proses Komunikasi
- C. Fungsi Komunikasi

BAB II

KOMUNIKASI POLITIK

- A. Filsafat Komunikasi Politik
 - 1. Definisi Filsafat
 - 2. Ciri-Ciri Filsafat
 - 3. Objek Filsafat
- B. Filsafat Komunikasi dan Filsafat Politik
 - 1. Filsafat Komunikasi
 - 2. Filsafat Politik
 - 3. Hakikat Komunikasi Politik
- C. Komunikasi Politik ---85
 - 1. Bentuk-Bentuk Komunikasi Politik ---88
 - 2. Tujuan Komunikasi Politik ---90
 - 3. Komponen Komunikasi Politik ---92

BAB III

KOMUNIKASI POLITIK DALAM MEDIA MASSA

- A. Media Massa
 - 1. Karakteristik Media Massa
 - 2. Media Massa dan Khalayak
- B. Media Massa Sumber Pengaruh Politik
- C. Efek Komunikasi Massa pada Sosialisasi Politik
- D. Media Massa dan Pesan Politik
 - 1. Obyektivitas Media Massa
 - 2. Kampanye Politik di Media Massa

BAB IV

KONFLIK KEKUASAAN POLITIK

- A. Kekuasaan Negara
- B. Konflik Kekuasaan
 - 1. Konflik Tinjauan Teoretik
 - 2. Perspektif Sosial Politik
 - 3. Perspektif Kebudayaan
- C. Resolusi Konflik
 - 1. Memahami Konflik dengan Kekerasan
 - 2. Menangani Konflik
- D. Pemimpin Politik
- E. Kekuasaan Lokal
 - 1. Pemilihan Kepala Daerah
 - 2. Sistem Pilkada Langsung
 - 3. Pilkada Langsung di Indonesia

BAB I

PERSEPSI KOMUNIKASI

Kata komunikasi sudah menjadi istilah milik umum, bukan lagi istilah eksklusif milik kelompok tertentu seperti sejumlah istilah keilmuan lain. Komunikasi sudah menjadi kata-kata pasaran yang dapat digunakan oleh siapapun dan dalam konteks apapun. Oleh karena itu, orang-orang sudah memiliki kebebasan untuk mempersepsikan istilah komunikasi sesuai dengan *frame* masing-masing.

Ketika orang berpidato, berceramah, atau mengungkapkan pikiran dan perasaannya baik melalui media massa maupun tidak, banyak pihak mempersepsi bahwa orang tersebut sedang berkomunikasi. Ketika sekelompok orang atau kerumunan orang berdiskusi baik di televisi maupun dalam ruangan-ruangan rapat, bahkan di warung kopi sekalipun, itu pun dapat dipersepsi sedang berkomunikasi. Bahkan, orang terduduk diam atau berdiri mematung tanpa mengungkapkan sepatah kata pun sering dikategorikan sedang berkomunikasi, termasuk orang-orang yang membakar dupa di bawah pohon rindang pun berkomunikasi.

Istilah komunikasi memang sudah menjadi bagian keseharian kehidupan manusia, bahkan dalam persepsi manusia, dalam kehidupan hewan pun terjadi komunikasi sebagaimana sejumlah hasil penelitian yang mengarahkan pada lahirnya komunikasi hewani. Hewan dapat berkembang biak karena berkomunikasi. Warna warni suara burung, monyet, kambing, dan binatang lainnya menunjukkan warna-warninya makna yang sedang dikomunikasikan. Setiap suara yang hewan keluarkan memiliki warna makna yang berbeda dengan warna suara lainnya.

Inti komunikasi adalah manusia. Ketika manusia ada maka semua lini kehidupan manusia tersebut adalah komunikasi. Dalam konteks inilah manusia dianggap sebagai makhluk yang paling sempurna karena dapat melahirkan komunikasi; semua hal dapat dipersepsi sebagai komunikasi jika manusia mempersepsikan sebagai komunikasi, sehingga persepsi komunikasi ini selalu mengikuti aturan yang dibuat manusia.

Oleh karena itu, pola-pola komunikasi selalu mengikuti pola-pola keteraturan perilaku manusia, bukan pola-pola hukum alam. Hasil penelitian Cushman dan Pearce (1977) menegaskan bahwa individu di dalam membuat keputusan (berpelaku) sesuai dengan *rules* tertentu, baik yang bersifat personal maupun kelompok, dan tidak diatur/didasarkan pada hukum-hukum alam yang bersifat deterministik.

Menurut Ninna Syam (2002:15), keteraturan dalam komunikasi manusia merupakan fungsi dari lima faktor sebagai berikut :

1. Hukum alam, fisiologis (*faali*), biologi, psikologi, dan bahkan fisika memungkinkan munculnya tindakan atau gerakan tertentu. Gerakan-gerakan tertentu itu sangat dipengaruhi oleh hukum-hukum gerak atau tindakan yang

bersifat fisik dan neurologikal. Ini semua mempengaruhi semua perilaku manusia (P. Andersen, Garrison & J. Andersen,1979).

2. *Rules* (norma-norma budaya) ada pada diri setiap orang, baik dalam sistem regional maupun sosial, meskipun tidak disadari. Manusia berperilaku sesuai dengan norma-norma ini karena setiap orang dalam konteks kebudayaannya berperilaku sama/serupa, dan ini seringkali tanpa disadari (P. Andersen, Lustig & J. Andersen,1987).
3. Sifat-sifat pribadi (*personal traits*) merupakan predisposisi, pola-pola personal atau tindakan-tindakan yang bersifat habitual (kebiasaan) yang telah dan sedang berkembang pada diri individu. Ini sering kali tidak disadari, kecuali jika mereka mencapai tingkat kesadaran tertentu, maka pola-pola semacam itu dipandang sebagai bagian dari kepribadian. Orang menggambarkan dirinya dengan ribuan istilah sifat seperti kasih sayang, *nervous*, malu atau *talk-active* (senang ngobrol) (P. Andersen,1987).
4. Pola-pola relasional (*relational patterns*) merupakan tindakan yang bisa diramalkan (terpola) pada situasi komunikasi kelompok kecil atau *dyads*. Mereka yang terlibat mungkin sadar atau mungkin tidak, senang atau tidak senang dengan keteraturan ini, tetapi keteraturannya nampak mencolok (mudah diramalkan) (Cronea Pearce dan Snavely,1979).
5. Pilihan-pilihan yang disadari relatif dapat menggambarkan semua bentuk perilaku komunikasi ((P. Andersen, 1986). Bagaimanapun juga manusia dapat melakukan suatu pola perilaku yang sangat disadari seperti dalam membuat perencanaan, penyusunan strategi, taktik serta perilaku lainnya yang diarahkan untuk mencapai suatu sasaran.

A. Definisi Komunikasi

Dalam konteks keilmuan pun istilah komunikasi sudah mengalami perluasan. Komunikasi sudah milik semua disiplin ilmu, tidak hanya Ilmu Sosial, tetapi ilmu-ilmu eksakta pun sudah lekat dengan istilah komunikasi. Kita sekarang mengenal komunikasi kesehatan, komunikasi fisika, komunikasi biologi, komunikasi matematika, dan komunikasi-komunikasi lainnya. Bahkan, Perspektif Pohon Komunikasi yang digambarkan Nina Winangsih Syam (2002) dalam *Rekonstruksi Ilmu Komunikasi* memaparkan dengan jelas bahwa terjadi sinergitas di antara Ilmu Komunikasi dengan ilmu-ilmu lainnya yang ada di muka bumi ini.

Realitas tersebut menjadi landasan yang kokoh bagi setiap ilmuwan untuk mempersepsikan definisi komunikasi sesuai dengan pendekatan masing-masing. Katrine Miller (2005) menyatakan bahwa konsep komunikasi sangat banyak dan berubah secara substantif sepanjang waktu. Sarah Trenholm (1991) menyatakan bahwa meskipun komunikasi dapat lintas negara, hal ini bukan berarti komunikasi tidak dapat dipahami. Kendati dalam konteks Etimologi Bahasa, istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggris *communication* berasal dari kata bahasa Latin *communicatio* dan bersumber dari kata *communis* yang berarti sama. Dalam persepsi umum, kata *sama* yang dimaksud di sini adalah sama makna.

Kalau dua orang terlibat dalam komunikasi, misalnya dalam bentuk perbincangan, komunikasi terjadi jika di antara dua orang tersebut terjadi kesamaan makna mengenai hal yang diperbincangkan tersebut. Dalam konteks ini, Onong Uchjana Effendi (2001:9) mengistilahkannya sebagai tindakan yang komunikatif.

Namun, ada juga yang menggunakan istilah komunikasi sosial (*social communication*) atau komunikasi manusia (*human communication*) adalah ilmu yang mempelajari pernyataan antara manusia yang bersifat umum dengan menggunakan lambang-lambang (simbol) yang berarti.

Esensinya, menurut Santoso Santropoetro (1987:7) adalah kesamaan pengertian di antara mereka yang berkomunikasi. Suatu komunikasi dalam kegiatannya berlangsung melalui suatu proses, yaitu jalan dan urutan kegiatan sehingga terjadi/timbul pengertian tentang suatu hal di antara unsur-unsur yang saling berkomunikasi. Komunikasi adalah kegiatan manusia untuk saling memahami atau mengerti tentang suatu pesan yang dihadapi bersama, yaitu antara pemberi pesan (komunikator) dengan penerima pesan (komunikan), pada umumnya berakhir dengan suatu efek atau hasil. Efek komunikasi merupakan segala perubahan yang terjadi di pihak komunikan sebagai akibat diterimanya suatu pesan oleh komunikan.

Tahun 1976, Frank Dance dan Carl Larson telah mengumpulkan 126 definisi komunikasi yang berlainan. Sekarang, dengan makin berkembangnya Ilmu Komunikasi dan makin banyaknya ilmuwan komunikasi, sangat dimungkinkan definisi komunikasi tersebut jauh lebih banyak.

Dance menemukan tiga dimensi konseptual penting yang mendasari definisi komunikasi sebagai berikut:

Pertama adalah tingkat observasi (*level of observation*) atau derajat keabstrakannya. Misalnya, definisi komunikasi sebagai "proses yang menghubungkan satu sama lain bagian-bagian terpisah dunia kehidupan" adalah terlalu umum, sementara komunikasi sebagai "alat untuk mengirim pesan militer, perintah dan sebagainya lewat telepon, telegraf, radio, kurir, dan sebagainya" terlalu sempit.

Kedua adalah kesengajaan (*intentionality*). Sebagian definisi mencakup hanya pengiriman dan penerimaan pesan yang disengaja; sedangkan sebagian definisi lainnya tidak menuntut syarat ini. Contoh definisi yang mensyaratkan kesengajaan ini dikemukakan Gerald R. Miller, yakni komunikasi sebagai suatu situasi-situasi yang memungkinkan suatu sumber menstranmisikan suatu pesan kepada seorang penerima dengan disadari untuk mempengaruhi perilaku penerima. Definisi komunikasi yang mengabaikan kesengajaan adalah definisi yang dinyatakan Alex Gode, yakni suatu proses yang membuat sama bagi dua orang atau lebih apa yang tadinya merupakan monopoli seseorang atau sejumlah orang.

Ketiga adalah penilaian normatif. Sebagian definisi meskipun secara implisit menyertakan keberhasilan atau kecermatan; sebagian lainnya tidak seperti itu. Definisi Komunikasi dari John B. Hoben, misalnya, mengasumsikan bahwa komunikasi itu harus berhasil: Komunikasi adalah pertukaran verbal pikiran atau gagasan. Asumsi dibalik definisi tersebut adalah bahwa suatu pikiran atau gagasan secara berhasil dipertukarkan. Sebagian

definisi lainnya tidak otomatis mensyaratkan keberhasilan ini, seperti definisi komunikasi dari Bernard Berelson dan Gary Steiner, komunikasi adalah transmisi informasi.

Carl I. Hovland menyatakan bahwa komunikasi adalah proses mengubah perilaku orang lain (*communication in the process to modify the behavior of other individuals*). Sementara itu, menurut William Albig (dalam Djoernasih,1991:16), "*Communication is the process of transmitting meaningful symbols between individuals.*" (Komunikasi adalah proses penyampaian dan penerimaan lambang-lambang yang mengandung makna di antara individu-individu) dan menurut Bernard Berelson dan Barry A. Stainer (dalam Effendy,1992:48), komunikasi adalah penyampaian informasi, gagasan, emosi, keterampilan dan sebagainya dengan menggunakan bahasa, gambar-gambar, bilangan, grafik, dan lain-lain.

Definisi komunikasi dari Berelson dan Steiner (1964) memfokuskan pada unsur penyampaian. Shannon dan Weaver (1949) juga menerima unsur penyampaian ini, akan tetapi mereka menambahkan unsur inheren lainnya pada waktu mereka mendefinisikan komunikasi, sebagai : mencakup semua prosedur melalui mana pikiran seseorang dapat mempengaruhi orang lainnya. Seperti itu pula Shachter (1961) yang menulis bahwa komunikasi merupakan mekanisme untuk melaksanakan kekuasaan. Definisi semacam itu menempatkan komunikasi sebagai unsur kontrol sosial di mana seseorang mempengaruhi atau berusaha mempengaruhi perilaku, keyakinan, sikap, dan seterusnya dari orang lain dalam suatu suasana sosial.

Gray dan Wise (1959) sependapat dengan konsepsi komunikasi menurut aliran *behaviorist* sebagai penyajian stimuli maupun sebagai suatu respon apakah itu yang sebenarnya ataupun yang dikhayalkannya sebagaimana ia timbul dalam kesadaran si pengambil inisiatif dari proses ini. Tanpa mendalami kelebihan dan kekurangan aliran *behaviorist*, orang dapat dengan secara aman mengasumsikan bahwa memandang komunikasi dalam pengertian fenomena stimuli-respon merefleksikan pengaruh secara garis besarnya saja dari skinner atau psikologi perilaku bersama semua revisi dan penyempurnaannya yang dilakukan orang pada tahun-tahun akhir ini.

Fotheringham (1966) menunjukkan bahwa tujuan komunikasi yang diterima secara meluas adalah ia harus benar-benar fragmatis, artinya : untuk menolong si penerima menangkap arti yang sama sebagaimana yang ada dalam pikiran si komunikator. Gode (1959) menerapkan suatu unsur yang sama, khususnya disebut kebersamaan arti, ia mendefinisikan komunikasi menjadi suatu proses yang membuat adanya kebersamaan bagi dua atau lebih orang yang semula dimonopoli oleh satu atau beberapa orang.

Menurut B. Aubrey Fisher (1986: 11) bahwa komunikasi dapat dipandang baik atau efektif sejauh ide, informasi, dan sebagainya dimiliki bersama oleh atau mempunyai kebersamaan arti bagi orang-orang yang terlibat dalam perilaku komunikasi tadi.

Dari banyaknya definisi komunikasi tersebut, untuk lebih memahami komunikasi para peminat komunikasi seringkali mengutip paradigma komunikasi yang dikemukakan Harold Lasswell dalam karyanya *The Structure and Function of Communication in Society*. Menurutnya, pendekatan yang tepat untuk memahami komunikasi ialah dengan menjawab pertanyaan: *Who Says What In Which Channel To Whom With What Effect?*

Dalam paradig Lasswel tersebut dijelaskan bahwa dalam upaya memahami komunikasi harus dapat menjawab lima unsur dalam komunikasi, yakni : Komunikator (*communicator, sender, source*), pesan (*message*), media (*channel*), komunikan (*communicant, communicate, receiver, recipient*), dan efek (*effect, impact, influence*).

Berdasarkan lima unsur tersebut, persepsi tentang komunikasi menurut Lasswell adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang akan menimbulkan efek tertentu.

Memang secara umum, titik tekan pengertian komunikasi tidak dapat melepaskan diri dari model komunikasi klasik yang pernah diungkapkan Aristoteles bahwa inti dari komunikasi adalah adanya komunikator yang bertugas menyampaikan pesan, sehingga pesan juga harus ada sebagai muatan dalam komunikasi, dan adanya penerima pesan atau disebut komunikan. Adapun di antara komunikator, pesan, dan komunikan itu muncul istilah-istilah lain sangat bergantung dari pendekatan masing-masing ilmuwan termasuk tingkat khazanah berpikir para peminat ilmu komunikasi.

B. Proses Komunikasi

Beranjak dari setumpuk definisi tentang komunikasi dengan berbagai perspektif dari para ilmuwan, secara umum banyak ilmuwan sepakat bahwa komunikasi itu merupakan sebuah proses penyampaian pesan dalam bentuk ide, gagasan, pikiran, perasaan, emosi, perilaku dan sebagainya.

Pesan dapat juga berbentuk verbal maupun non-verbal dan dapat disengaja (*intentional*) dan tidak disengaja (*unintentional*). Ada empat jenis pesan yang mungkin ada dalam proses komunikasi: (1) verbal disengaja; (2) verbal tak disengaja; (3) nonverbal disengaja; (4) non verbal tak disengaja. Pesan verbal adalah semua jenis komunikasi lisan yang menggunakan satu kata atau lebih. Hampir semua rancangan wicara (*communicative stimuli*) yang disadari masuk dalam kategori pesan verbal disengaja; yaitu usaha-usaha yang dilakukan secara sadar untuk berhubungan dengan orang lain secara lisan. Pesan verbal tidak disengaja adalah sesuatu yang dikatakan tanpa bermaksud mengatakan hal tersebut. Pesan nonverbal merupakan seluruh aspek perilaku: ekspresi wajah, sikap tubuh, nada suara, gerakan tangan, cara berpakaian dan sebagainya. Pesan tersebut meliputi semua pesan yang disampaikan tanpa kata-kata atau selain dari kata-kata yang digunakan. Perbedaan pesan non-verbal yang disengaja dan yang tidak disengaja adalah dalam aspek keinginan, jika pesan non-verbal yang ingin disampaikan berarti pesan non-verbal disengaja, sedangkan yang tidak ingin disampaikan dianggap tidak disengaja. (Tubbs, 2000:8-9)

Onong Uchjana Effendy (2001:11) membagi proses komunikasi dalam dua sisi. Pertama, proses komunikasi secara primer dan kedua, proses komunikasi secara skunder. Proses komunikasi secara primer adalah proses penyampaian pikiran dan atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang (*symbol*) sebagai media. Sementara itu, proses komunikasi secara skunder adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat dan sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama.

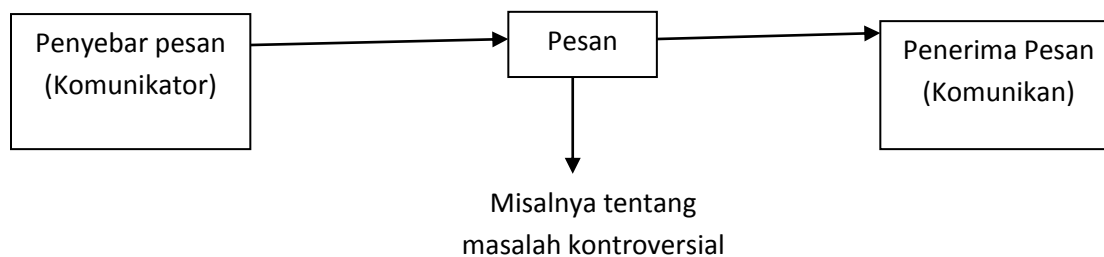
Pendapat yang dikemukakan Onong Uchjana Effendy dapat diilustrasikan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Seseorang berbicara dengan orang lain secara *face to face* di manapun tempatnya, mau di kampus, di warung kopi, di angkot bahkan di jalanan ketika bertemu teman lama, maka menurut Onong, mereka melakukan proses komunikasi primer. Namun, jika orang tersebut berbicara atau mengobrol menggunakan telepon atau hand phone, dan alat sejenisnya, mereka dikategorikan melakukan proses komunikasi skunder.

May Rudi (2005:2) mendefinisikan proses komunikasi adalah rangkaian kejadian/peristiwa atau perbuatan melakukan hubungan, kontak, dan interaksi satu sama lain (pada umumnya di antara makhluk hidup, walau lebih jauh dalam era *cyber technology* ini telah pula dimungkinkan komunikasi dengan komputer dan robot) berupa penyampaian dan penerimaan lambang-lambang yang mengandung arti atau makna.

Dalam proses komunikasi paling sedikit terdapat tiga unsur pokok, yaitu misi penyebar pesan, pesannya, dan si penerima pesan. Suatu komunikasi dapat dikatakan efektif/berhasil bilamana di antara penyebar pesan dan penerima pesan terdapat suatu pengertian yang sama mengenai isi pesan. Isi pesan disampaikan oleh penyebar melalui lambang yang berarti. Lambang-lambang itu dapat dikatakan sebagai titian atau kendaraan untuk membawa pesan kepada si penerima. Lambang-lambang atau simbol-simbol yang digunakan antarmereka dapat terdiri atas: bahasa (baik lisan maupun tulisan), isyarat-isyarat, gambar-gambar, tanda-tanda, dan lain-lain.

Gambar 1.1

Proses Komunikasi 1



Sumber : Santoso Sastropoetro, 1987: 8

Gambar 1.1 ini mengingatkan pada model komunikasi yang paling klasik yang dikemukakan Aristoteles yang sering juga disebut model retorik (*rhetorical model*). Aristoteles adalah Filosof Yunani yang menjadi tokoh paling dini mengkaji komunikasi yang memberikan titik tekan pada persepsi persuasi. Ia berjasa dalam merumuskan model verbal pertama. Menurutnya, komunikasi terjadi ketika seseorang pembicara menyampaikan pembicaraannya kepada khalayak dalam upaya mengubah sikap mereka. Ia mengemukakan tiga unsur dalam proses komunikasi, yakni pembicara (*speaker*), pesan (*message*), dan pendengar (*listener*).

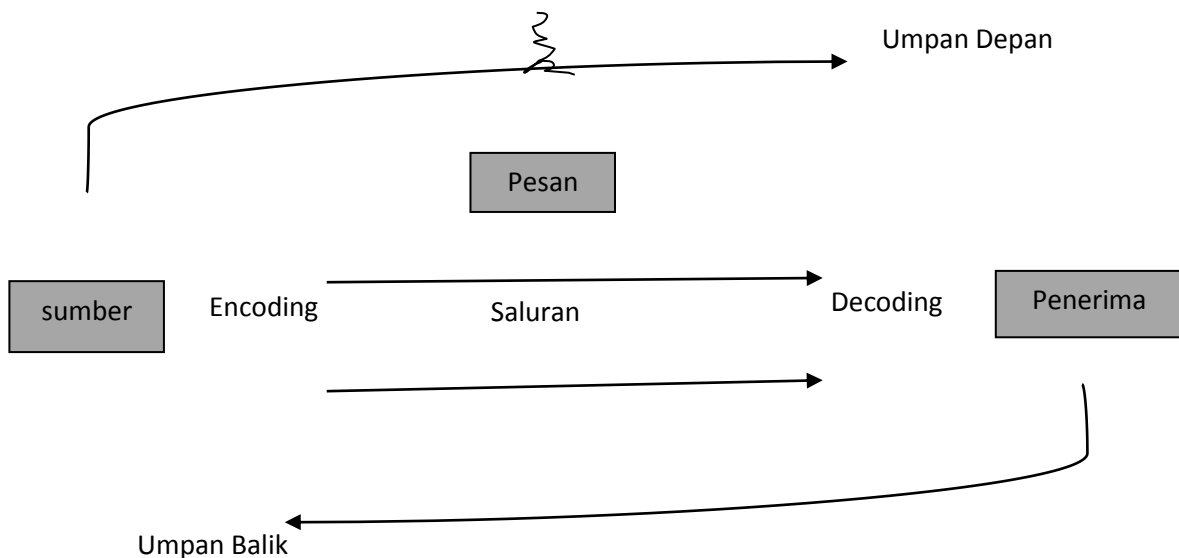
Fokus komunikasi yang ditelaah Aristoteles adalah komunikasi retorik yang kini lebih dikenal dengan komunikasi publik (*public speaking*).

Dan B. Curtis, James J. Floyd, dan Jerry L. Winsor (2004:7) menekankan beberapa komponen proses komunikasi, yakni sumber, pesan, penyandian, saluran, umpan depan, penguraian sandi, penerima, umpan balik, gangguan, dan konteks.

Gambar 1.2

Proses Komunikasi 2

Gangguan

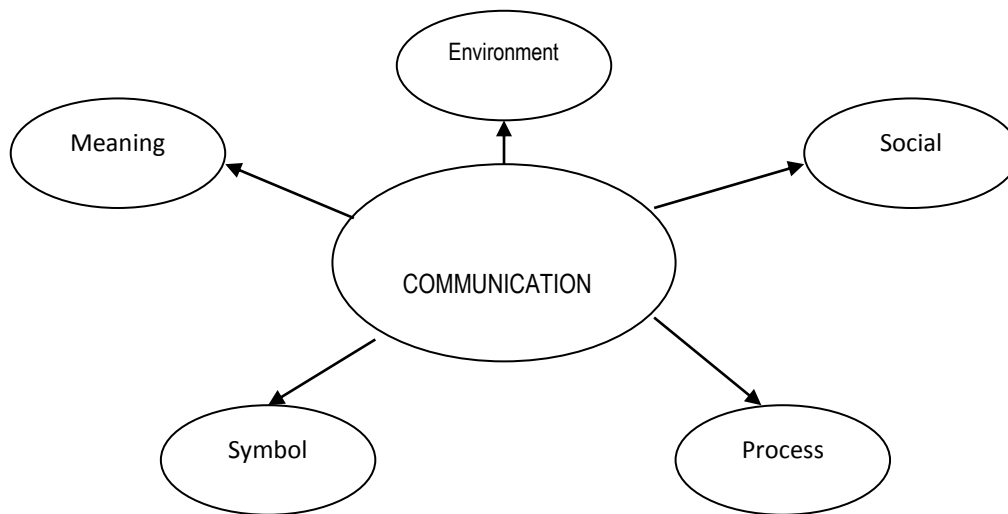


Sumber : Dan B. Curtis et. al, 2004

Sumber (komunikator) adalah pemrakarsa suatu pesan. Penyandian atau penulisan sandi adalah suatu proses atau tindak penyeleksian simbol-simbol yang mewakili pikiran seseorang. Sebuah sumber memilih sandi verbal atau nonverbal, seperti Inggris-Amerika dan mengirimkan simbol-simbol melalui saluran-saluran (seperti gelombang suara dan rangsangan visual) yang akan dipahami oleh para penerima. Umpan depan adalah informasi pengantar mengenai komunikasi masa mendatang yang meliputi pesan-pesan verbal. Penguraian sandi adalah suatu proses pemberian arti terhadap simbol-simbol yang diterima. Penerima adalah orang-orang yang menerima simbol-simbol. Umpan balik adalah setiap pesan verbal atau nonverbal yang dikirimkan kembali kepada sumber yang berhubungan dengan pesan sumber. Gangguan adalah setiap faktor yang mengubah atau mencampuri penerimaan pesan yang jelas. Konteks meliputi kondisi fisik dan kondisi lain yang melingkupi tindakan komunikasi

Katrine Miller (2005) pun berpendapat bahwa komunikasi merupakan suatu proses sosial dimana individu menyampaikan simbol untuk menyeimbangkan dan menafsirkan makna dalam lingkungannya. Dalam konteks ini, terdapat lima kunci istilah dalam proses komunikasi, yakni sosial, proses, simbol, makna, dan lingkungan sebagaimana gambar berikut:

Gambar 1.3
Proses Komunikasi Sosial



Sumber Baldwin, 2004

Pertama diyakini bahwa komunikasi merupakan proses sosial. Pada saat ditafsirkan komunikasi sebagai proses sosial, hal itu melibatkan sejumlah orang dalam interaksi, minimalnya melibatkan dua orang, pengirim dan penerima (pesan). Hal ini tentu saja melibatkan intensitas, motivasi dan kemampuan. Komunikasi ini akan selalu berlangsung (tanpa awal) dan tanpa akhir sehingga komunikasi merupakan hal yang sifatnya kompleks, dinamis dan berubah secara kontinu.

Kedua, proses alami dari komunikasi dapat dilihat salah satunya dari awal hingga akhir percakapan. Dalam proses ini, individu dan budaya dapat mengubah efek komunikasi. Komunikasi sebagai proses berkaitan dengan sifat komunikasi yang tidak dapat diulang dan dikembalikan ke posisi sebelum komunikasi berlangsung. Dance (1967) menggambarkan proses komunikasi dalam bentuk spiral atau *helix*. Dance menyatakan bahwa pengalaman komunikasi merupakan akumulasi dan dipengaruhi oleh masa lalu sehingga proses komunikasi yang berlangsung tidak bersifat linier. Dengan demikian komunikasi merupakan proses yang berubah sepanjang waktu di antara partisipannya (pihak yang terlibat dalam proses komunikasi dimaksud).

Ketiga, komunikasi pada hakikatnya merupakan suatu simbol. Simbol dimaksud merupakan label atau 'sesuatu' yang dapat mewakili dan ditunjukkan pada suatu fenomena. Terdapat dua jenis simbol dalam proses komunikasi, yaitu (1) simbol konkret yang mewakili suatu obyek, dan (2) simbol abstrak yang mewakili suatu ide atau gagasan.

Keempat, hal yang mengaitkan antara proses dengan simbol adalah makna yang merupakan pusat dari pendefinisian komunikasi. Makna merupakan apa yang orang disarikan dari pesan.

Kelima, lingkungan merupakan situasi / konteks dimana komunikasi terjadi. Lingkungan dimaksud termasuk sejumlah elemen yang terdiri dari waktu, tempat, periode sejarah, hubungan dan latar belakang budaya antara pembicara dan pendengar.

Gerald Miller dan Mark Steinberg (1975) menafsirkan proses komunikasi sebagai berikut :

We have chosen to restrict our discussion of communication to intentional symbolic transactions: those in which at least one of the parties transmits a message to another with the intent of modifying the other's behavior... by our definition, intent to communicate and intent to influence are synonymous. If there is no intent, there is no message.

Meskipun demikian, hal tersebut dapat diperdebatkan, terutama terkait dengan adanya pesan yang disampaikan tanpa tujuan- atau pesan yang disampaikan karena seseorang salah memberi makna terhadap sesuatu hal. Miller-Steinberg (1975) menyatakan bahwa yang disebut dengan komunikasi apabila pesan disampaikan secara sengaja (mempunyai tujuan) dan diterima secara akurat.

Palo Alto menyatakan bahwa ketika dua orang yang bersama-sama, mereka akan berkomunikasi karena tidak dapat menghindar dari berperilaku. Meskipun mereka saling diam dan menghindari kontak mata, pada hakikatnya mereka berkomunikasi. Lebih lanjut, mereka meyakini bahwa segala sesuatu yang dilakukan, termasuk pengabaian, berbicara yang membingungkan kepada orang lain pun juga merupakan komunikasi. Kenyataannya, Michael Motley (1990) memberikan alasan bahwa tidak semua perilaku merupakan komunikasi, hanya perilaku yang interaktif sajalah yang disebut sebagai komunikasi.

C. Fungsi Komunikasi

Tidak satu kata pun yang ada di dunia ini tidak berfungsi. Allah yang Maha Pemurah telah menciptakan seluruh isi bumi ini dengan fungsinya; untuk kemaslahatan umat. Namun, dalam kehidupan real selanjutnya, kadang manusia tidak memahami fungsi dari eksistensi suatu kata atau suatu benda tersebut.

Terlebih kata *komunikasi*, sebagaimana dipaparkan di atas, jika disimak secara saksama fungsi komunikasi itu sangat banyak, bahkan mungkin akan lebih dulu habis tinta, ketimbang dapat memaparkan fungsi komunikasi sampai selesai. Hal itu untuk menggambarkan betapa banyaknya fungsi komunikasi dalam kehidupan manusia di dunia ini. Namun, demikian bukan berarti orang tak mampu menuliskannya. Banyak peminat komunikasi

atau ilmuwan komunikasi yang sudah memaparkan persepsinya tentang fungsi komunikasi, tetapi mereka belum mampu memuaskan semua pihak. Masih memungkinkan muncul persepsi lain tentang fungsi komunikasi. Oleh karena itu, buku ini dipastikan tidak akan mampu memuaskan para peminat komunikasi dalam hal memaparkan fungsi komunikasi.

Deddy Mulyana (2001) dengan menggunakan kaca mata agama Islam membongkar hakikat fungsi manusia berkomunikasi. Menurutnya, Tuhanlah yang mengajari manusia berkomunikasi, dengan menggunakan akal dan kemampuan berbahasa yang dianugerahkan-Nya kepada manusia. Al-Qur'an mengatakan, *"Tuhan Yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Dia menciptakan manusia yang mangajarinya pandai berbicara."* (Ar-Rahman: 1-4).

"Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama-nama benda itu jika kamu orang-orang yang benar!" Mereka menjawab, "Maha Suci Engkau tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah engkau ajarkan kepada kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." Allah berfirman, "Hai Adam beritahukanlah kepada mereka nama benda-benda ini." Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama benda-benda itu Allah berfirman, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya Aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan yang kamu sembunyikan." (Al-Baqarah: 31-33)

Persepsi fungsi komunikasi sebagaimana diungkapkan Deddy Mulyana dengan mengutip ayat-ayat dalam Al-Qur'an memang tidak dapat disangkal dan menguatkan hakikat dari manusia berkomunikasi. Hakikat manusia berkomunikasi merupakan upaya menjalankan tugas sebagai khalifah di muka bumi ini. Tugas pokok manusia sebagai khalifah di muka bumi ini adalah menghambakan diri dan mengabdikan diri kepada Allah Swt dengan jalan beriman dan bertakwa kepada-Nya. Dalam konteks lain, dapat lebih ditegaskan bahwa manusia berkomunikasi adalah menjalankan perintah Allah atau dalam istilah agama adalah beribadah. Manusia berkomunikasi adalah beribadah.

Hal itu sejalan dengan visi ke-Islaman yang memegang teguh filsafat komunikasi *hablum minannas* dan *hablum minallah* bahwa manusia harus menjalin komunikasi dengan sesama manusia dan dengan Sang Khaliq; Allah Swt. Oleh karena itu, lahirlah model komunikasi vertikal dan horizontal. Kedua model inilah yang menurunkan makin banyak cabang ilmu komunikasi. Komunikasi vertikal menurunkan lahirnya komunikasi transendental, supranatural, suprasegmental, dan komunikasi ritual. Sementara itu, komunikasi horizontal melahirkan komunikasi intrapersonal, antar-persona, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, komunikasi massa, dan jenis komunikasi lainnya yang berkaitan dengan menjalin hubungan antara manusia dengan manusia lainnya baik secara individual maupun kelompok, baik komunikasi bermedia atau pun komunikasi langsung.

Pakar komunikasi Barat yang banyak dijadikan rujukan oleh para ilmuwan komunikasi di Indonesia, Harold D. Laswell (1948) memaparkan tentang fungsi komunikasi sebagai berikut :

1. Penjagaan/pengawasan lingkungan (*surveillance of the environment*);
2. Menghubungkan bagian-bagian yang terpisah dari masyarakat untuk lingkungannya (*correlation of the part of society in responding to the environment*); dan
3. Menurunkan warisan sosial dari generasi ke generasi berikutnya (*transmission of social heritage*).

Menurutnya, ada tiga kelompok yang selama ini melaksanakan ketiga fungsi tersebut. Fungsi pertama dijalankan oleh para diplomat, atase, dan koresponden luar negeri sebagai usaha menjaga lingkungan. Fungsi kedua, lebih diperankan oleh para editor, wartawan, dan juru bicara sebagai penghubung respon internal. Fungsi ketiga, dilaksanakan oleh para pendidik dalam lingkungan pendidikan formal atau informal karena terlibat dalam mewariskan adat kebiasaan, nilai-nilai dari generasi ke generasi.

William I. Gordon (1978) mengungkapkan empat kerangka fungsi komunikasi. Pertama komunikasi sosial. Dengan komunikasi manusia dapat berhubungan sosial dengan sesama manusia lainnya dalam upaya memupuk silaturahmi, membangun aktualisasi diri, menanamkan citra diri, dan bekerjasama dalam berbagai bentuk kehidupan guna mempertahankan keberlangsungan hidup.

Kedua komunikasi ekspresif. Fungsi komunikasi ini berkait erat dengan komunikasi sosial. Dalam kehidupannya memupuk komunikasi sosial, manusia memiliki keinginan untuk mengungkapkan berbagai perasaan dirinya terhadap pihak lain baik sebagai individu maupun kelompok. Berbagai perasaan manusia, seperti sayang, rindu, cinta, benci, peduli, simpati, sedih, takut, marah, dan berbagai gejala perasaan lainnya diungkapkan kepada manusia lain melalui berbagai bentuk pesan-pesan, baik verbal maupun non-verbal.

Ketiga komunikasi ritual. Manusia hidup tidak dapat melepaskan diri dari sistem kehidupan yang sudah dibentuk sebelumnya. Prosedur-prosedur kehidupan yang nyaris sebagian sudah melekat menjadi sebuah keyakinan dan keharusan dilakukan oleh manusia dalam menjalani fase-fase kehidupan. Pengungkapan berbagai perasaan sebagaimana komunikasi ekspresif dalam konteks memenuhi prosedur sistem kehidupan yang sudah diyakini, seperti pelaksanaan upacara kelahiran, ulang tahun, pernikahan, sampai pada upacara kematian merupakan bagian dari fungsi komunikasi ritual

Keempat komunikasi instrumental. Komunikasi instrumental lebih pada fungsi komunikasi untuk melakukan tindakan persuasif, yakni untuk membujuk orang atau pihak lain dengan berbagai penguatan informasi yang diberikan. Komunikasi ini bertujuan di antaranya menginformasikan, mengajarkan, mendorong, mengubah sikap dan keyakinan serta perilaku atau menggerakkan tindakan dan menghibur orang atau pihak lain.

Sementara itu, menurut Thomas M. Scheidel (1976) bahwa manusia berkomunikasi terutama untuk menyatakan dan mendukung identitas diri, untuk membangun kontak sosial

dengan orang di sekitar manusia, dan untuk mempengaruhi orang lain untuk merasa, berpikir, atau berperilaku seperti yang diinginkan. Menurut Scheidel, tujuan dasar manusia berkomunikasi adalah untuk mengendalikan lingkungan fisik dan psikologi.

Gordon I. Zimmerman et.al. (1977) merumuskan bahwa manusia dapat membagi tujuan komunikasi menjadi dua kategori besar. Pertama, manusia berkomunikasi untuk menyelesaikan tugas-tugas yang penting bagi kebutuhan manusia; untuk memberi makan dan pakaian kepada diri sendiri, memuaskan kepenasaran akan lingkungan, dan menikmati hidup. Kedua, manusia berkomunikasi untuk menciptakan dan memupuk hubungan dengan orang lain. Jadi komunikasi mempunyai fungsi isi yang melibatkan pertukaran informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas, dan fungsi hubungan yang melibatkan pertukaran informasi mengenai bagaimana hubungan manusia dengan manusia lain.

Rudolph F. Verderber (1978) mengemukakan bahwa komunikasi mempunyai dua fungsi. Pertama, fungsi sosial, yakni untuk tujuan kesenangan, untuk menunjukkan ikatan dengan orang lain, membangun dan memelihara hubungan. Kedua, fungsi pengambilan keputusan, yakni memutuskan untuk melakukan dan tidak melakukan sesuatu pada saat tertentu, seperti: apa yang akan dimakan pagi hari, apakah akan kuliah atau tidak, bagaimana belajar untuk menghadapi test. Menurut Verderber, sebagian keputusan itu dibuat sendiri dan sebagian lagi dibuat setelah berkonsultasi dengan orang lain. Sebagian keputusan bersifat emosional, dan sebagian lagi melalui pertimbangan yang matang. Semakin penting keputusan yang akan dibuat, semakin hati-hati tahapan yang dilalui untuk membuat keputusan. Verderber menambahkan, kecuali bila keputusan itu bersifat reaksi emosional, keputusan itu biasanya melibatkan pemrosesan informasi, berbagai informasi dan dalam banyak kasus, persuasi karena manusia tidak hanya perlu memroses data, tetapi sering juga untuk memperoleh dukungan atas keputusannya.

Charles R. Wright (1988) menambahkan satu fungsi komunikasi, yaitu entertainment (hiburan) yang menunjukkan pada tindakan-tindakan komunikatif yang terutama sekali dimaksudkan untuk menghibur dengan tidak mengundahkan efek-efek instrumental yang dimilikinya.

Sebenarnya cukup banyak pendapat para pakar komunikasi yang dapat dikutip yang memaparkan tentang fungsi komunikasi. Namun, kalau disimak bahwa keseluruhan pendapat tersebut kembali kepada hakikat fungsi komunikasi yakni membangun hubungan vertikal dan horizontal. Kendati jika ditakar, lebih banyak para pakar yang menitikberatkan komunikasi horizontal saja, yakni mengungkap hubungan manusia dengan manusia lainnya. ***

BAB VIII

DINAMISASI KOMUNIKASI POLITIK

Pengalaman adalah guru yang terbaik. Peribahasa itu tampaknya klasik, tetapi kalau ditelaah dengan pisau analisis yang tajam menyuratkan sebongkah makna yang teramat dalam. Peribahasa itu dapat dimaknai bahwa setiap orang dapat belajar banyak dari pengalaman yang dialaminya selama menjalani kehidupan. Hanya orang-orang yang memiliki berbongkah-bongkah pengalamanlah yang dapat menjadi orang yang mumpuni. Karena dengan pengalamannya, ia dapat belajar dan terus belajar, sehingga ilmu pengetahuannya bertambah dan terus bertambah.

Dalam konteks penyelenggaraan negara yang demokratis, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung di Republik Indonesia adalah pengalaman yang sangat berharga. Selama puluhan tahun Indonesia berdiri menjadi negara merdeka, baru pada tahun 2005-lah rakyat memiliki kesempatan untuk ikut andil dalam menentukan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Sejak Proklamasi Kemerdekaan RI, 17 Agustus 1945, Bangsa Indonesia telah dua belas kali mengadakan Pemilu.

Tabel 8.1
Pemilu di Indonesia

Pemilu Ke-	Pelaksanaan	Partai Peserta	Pada Era
Satu	19 September 1955	118	Orde Lama
Dua	3 Juli 1971	10	Orde Baru
Tiga	2 Mei 1977	3	Orde Baru
Empat	4 Mei 1982	3	Orde Baru
Kelima	28 April 1987	3	Orde Baru
Keenam	9 Juni 1992	3	Orde Baru
Ketujuh	1997	3	Orde Baru
Kedelapan	1999	48	Order Reformasi
Kesembilan	2004	24	Orde Langsung
Kesepuluh	2009	44	Orde Langsung
Kesebelas	2014	12 Parpol Nasional 3 Parpol Lokal Aceh	
Keduabelas	2019	16 Parpol Nasional 4 Parpol Lokal Aceh	

Sumber : Hasil Studi Dokumentasi

Pemilu pertama, 29 September 1955 diikuti 118 peserta Pemilu. Pemilu kedua, 3 Juli 1971 diikuti 10 (sepuluh) organisasi peserta Pemilu. Pemilu ketiga, 2 Mei 1977 diikuti 3 (tiga)

organisasi peserta Pemilu, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Pemilu keempat, 4 Mei 1982, masih diikuti tiga peserta pemilu. Pemilu kelima, 23 April 1987 diikuti tiga peserta Pemilu. Pemilu keenam, 9 Juni 1992 masih diikuti tiga peserta Pemilu, PPP, Golkar, dan PDI. Pemilu ketujuh, tahun 1997 masih diikuti dengan tiga peserta pemilu.

Karena terjadi "kegoncangan politik" yakni dengan lengsernya Presiden Soeharto dari jabatan presiden, maka Pemilu kedelapan dilaksanakan lebih cepat, yakni hanya dalam jangka waktu dua tahun, tepatnya tahun 1999 dilakukan Pemilu kedelapan dengan diikuti oleh 48 organisasi peserta Pemilu. Pemilu kesembilan dilaksanakan pada tahun 2004 dengan peserta Pemilu masih multipartai (24 partai/organisasi peserta pemilu), Pemilu kesepuluh dilaksanakan tahun 2009 dengan diikuti 44 partai politik (38 partai nasional, sisanya partai lokal di Aceh), Pemilu kesebelas dilaksanakan tahun 2014 dengan diikuti 15 partai politik (12 partai nasional, 3 partai lokal di Aceh), serta Pemilu keduabelas dilaksanakan tahun 2019 dengan diikuti 20 partai politik (16 partai nasional, 4 partai lokal di Aceh) .

Yang istimewa pada era reformasi terjadi perubahan drastis. Sebelumnya, kesembilan Pemilu dilaksanakan untuk memilih wakil rakyat yang duduk di DPR RI dan DPRD. Di DPR RI, dalam lembaga MPR RI, mereka bertugas memilih presiden. Namun pada tahun 2004 telah terjadi perubahan (amandemen) Undang-Undang Dasar 1945 dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang tadinya Presiden dipilih oleh MPR, kini langsung dipilih oleh rakyat, yakni Tahun 2004 dan 2019. Tindaklanjut dari pemilihan Presiden dan Wakil Presiden langsung ini ditajamkan dengan lahirnya Undang-Undang Otonomi Daerah No. 22 Tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan diubah lagi menjadi Undang-Undang No. 12 Tahun 2008. Dalam Undang-Undang tersebut ditegaskan bahwa kepala daerah pun dipilih secara langsung oleh rakyat.

Apabila dicermati, dalam perjalanan kehidupan pemerintahan Indonesia yang sudah melaksanakan Pemilu sebanyak dua belas kali, pada masa Orde Barulah Pemilu paling banyak dilakukan. Dari dua belas kali Pemilu di Indonesia tersebut berbagai pengalaman dapat dipetik, pahit ataupun manis dapat dicatat dan dianalisa baik kelebihan atau pun kekurangannya dari Pemilu-Pemilu tersebut. Yang jelas, dari Pemilu pertama (1955) hingga sekarang Indonesia telah melakukan tiga macam demokrasi, yaitu: Demokrasi Parlemen, Demokrasi Terpimpin, dan Demokrasi Pancasila. Ketiga Demokrasi tersebut dalam satu *frame* sering dinilai telah mengalami kegagalan. Pada Demokrasi Parlemen dan Demokrasi Terpimpin, kegagalan itu sangat erat kaitannya dengan tidak berfungsinya tiga prasyarat demokrasi politik, yaitu kompetisi secara periodik dan sehat, adanya partisipasi politik dalam memilih pimpinan negara dan penetapan kebijakan publik, serta adanya kebebasan sipil dan kebebasan politik.

Di Indonesia pada era itu, demokrasi masih menjadi konflik tafsiran atau interpretasi antar golongan. Golongan pertama terdiri dari sebagian besar mereka yang berpendidikan tinggi, terutama dari Barat. Golongan ini bisa disebut sebagai kelompok universalis. Mereka berpendapat, demokrasi seperti definisi di Barat. Golongan kedua terdiri dari sebagian besar birokrasi pemerintah. Mereka berpendapat bahwa setiap bangsa memiliki budaya demokrasi yang berbeda satu sama lain. Timbulnya perbedaan interpretasi tersebut kemungkinan besar

disebabkan oleh fakta bahwa demokrasi modern bagi Bangsa Indonesia saat itu adalah sesuatu yang asing; sesuatu yang diimpor dari luar untuk diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia yang berbasis nilai-nilai feodalisme dan *patron client*.

Pada era Demokrasi Pancasila sempat terjadi stabilitas pelaksanaan Pemilu sebanyak lima kali, yakni dari mulai Pemilu tahun 1977, 1982, 1987, 1992, 1997. Stabilitasnya pelaksanaan Pemilu secara periodik pada era Orde Baru menunjukkan situasi negara pada era Orde Baru lebih stabil daripada era lainnya. Bahkan, pada masa Orde Lama, Pemilu hanya dilaksanakan sekali; dalam perjalanan pasca-kemerdekaan tahun 1945, baru pada tahun 1955-lah Pemilu dapat diselenggarakan. Artinya, terdapat masa ketidakstabilan demokrasi lebih kurang 10 tahun atau memang masa itu demokrasi tidak berjalan sebagaimana mestinya bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat.

Namun, dalam akhir perjalanannya, era Demokrasi Pancasila dicoreng dengan lahirnya rejim yang berkuasa cenderung absolut. Demokrasi Pancasila yang diharapkan rakyat memiliki kekuasaan penuh melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), realitasnya kedua lembaga tersebut hanya menjadi "tukang stempel" saja. Pada masa Orde Baru terjadi ketimpangan kekuasaan yang dalam konsep idealnya bahwa MPR itu lembaga tertinggi negara dan DPR sebagai lembaga legislatif sejajar dengan presiden sebagai lembaga eksekutif, pada kenyataannya presidenlah yang paling kuat memiliki kekuasaan. Kedua lembaga tersebut terkesan hanya sebagai prasyarat legal formal demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, banyak pihak menilai bahwa realitasnya pada masa Orde Baru, Indonesia itu menganut Demokrasi Terpimpin dengan kekuasaan terpusat pada presiden. Semua lembaga negara, baik lembaga tertinggi maupun lembaga tinggi negara diatur dan selalu menaati semua perintah presiden, sehingga muncul kecenderungan Indonesia mengarah pada negara monarki; kekuasaan dipegang hanya oleh satu orang.

Realitas itulah, tampaknya yang membuat rakyat Indonesia marah dan terjadilah reformasi, termasuk yang diusung paling terdepan oleh rakyat Indonesia adalah reformasi politik, sehingga tahun 1999 dilakukan Pemilu "istimewa". Disebut istimewa karena Pemilu itu diselenggarakan bukan pada waktunya. Seharusnya, secara periodik lima tahun sekali, artinya setelah Pemilu tahun 1997, seharusnya diselenggarakan kembali Pemilu tahun 2002. Pemilu tahun 1999 diselenggarakan karena desakan seluruh rakyat Indonesia setelah lengsernya Presiden Soeharto dari kursi kekuasaan.

Ternyata reformasi politik di Indonesia bergulir sangat cepat. Desakan seluruh rakyat Indonesia untuk dapat berperan dalam menentukan nasib negara, termasuk menentukan pimpinan pemerintahan sangat deras, sehingga terjadilah berbagai reformasi politik besar-besaran dan sampailah pada Pemilu secara langsung. Tergoreslah sejarah bagi Bangsa Indonesia untuk pertama kalinya menyelenggarakan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung pada tahun 2004 yang terus berlanjut pada Pemilu 2009, Pemilu 2014, dan Pemilu 2019. Menggelindinglah era Demokrasi Langsung di Indonesia.

Reformasi politik pun terjadi pada Pemerintahan Daerah. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pemerintah Daerah yang menekankan sentralistik kekuasaan pada Pemerintah Pusat diubah dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang tersebut lebih dikenal dengan Undang-Undang Otonomi Daerah karena di dalamnya banyak mengatur tentang pembagian kekuasaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Tidak berhenti hanya di situ, geliat otonomi daerah pun terus bergulir cepat. Oleh karena itu, Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 pun tidak dapat bertahan lama digantikan dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Pada akhir masa jabatannya, DPR RI Periode 2009-2014 menilai Pilkada secara Langsung banyak masalah, sehingga dikeluarkan UU No. 22 Tahun 2014 yang secara substansial mengembalikan Pilkada oleh DPRD. Namun, belum pun UU tersebut dijadikan panduan penyelenggaraan Pilkada, Presiden Yudhoyono pada akhir masa jabatannya juga mengeluarkan Perpu No. 1 Tahun 2014 yang kontra substansi, Pilkada kembali dilakukan secara langsung oleh rakyat.

UU Pilkada 2014 terganjal Perpu dan Perpu pun harus mendapat persetujuan DPR. Sembari pada awal-awal periodenya, DPR 2014-2019 pun disibukkan dengan problem internal. Padahal, tahun 2015 Indonesia menyelenggarakan 227 Pilkada: 11 Pemilihan Gubernur, 180 Pemilihan Bupati, dan 36 Pemilihan Walikota. Akhirnya, DPR menyetujui Perpu No. 1 Tahun 2014 untuk disahkan menjadi UU.

Kemudian lahirlah Undang-Undang UU No. 1 tahun 2015 tentang Pilkada Langsung dengan *pemungutan suara serentak* : jadwal pemilihan suara dilaksanakan secara bersamaan dalam satu hari. Model Pilkada seperti itu sempat diamanahkan juga dalam UU No. 12 tahun 2008 hasil revisi UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, tetapi dengan istilah Pilkada Gabungan yang pernah diimplementasikan di berbagai daerah, termasuk pada Pilgub Jabar 2013 yang digabungkan dengan pemilihan Walikota Cirebon, Walikota Sukabumi, dan Bupati Sumedang.

Pilrentak diselenggarakan tahun 2015 dengan 8 provinsi, 170 kab. dan 26 kota, Pilrentak tahun 2017 dengan 7 provinsi, 76 kab. dan 18 kota. Pilrentak tahun 2018 dengan 17 provinsi, 115 kab. dan 39 kota dengan landasan Undang-Undang No. 8 tahun 2015 yang diubah menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 2016. Hal paling esensial dari penggantian Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah yang sangat cepat adalah rakyat daerah dapat menentukan sendiri pimpinan pemerintahan di daerah.

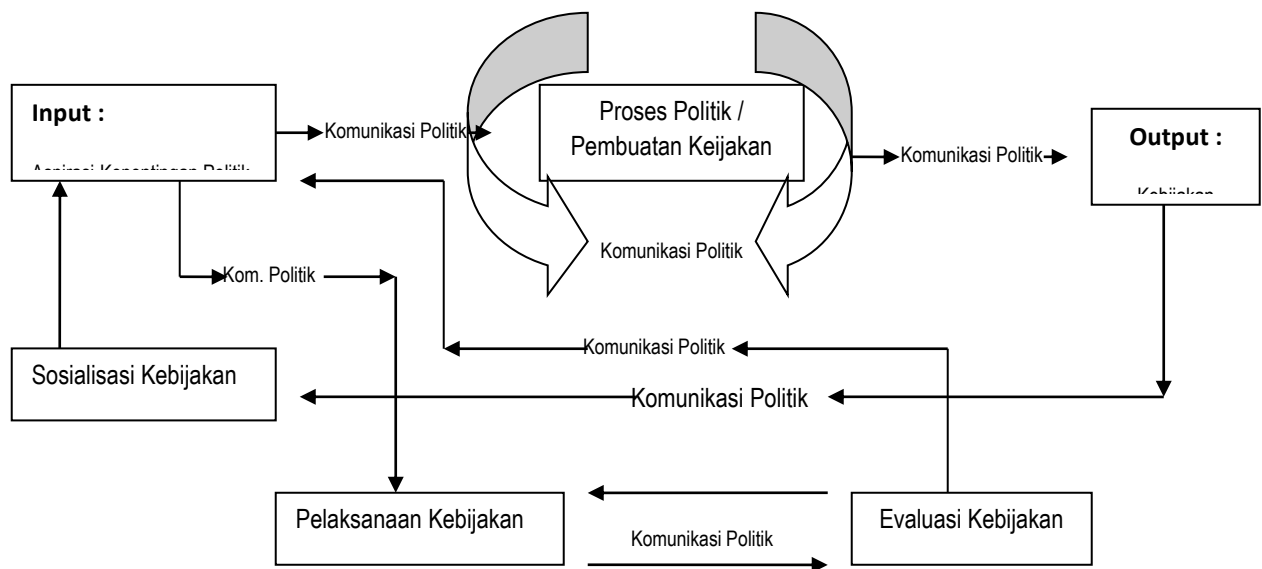
Geliat demokrasi Indonesia yang terus mengalami perubahan akan sejalan dengan geliatnya komunikasi politik yang berkembang di Indonesia. Karena pada dasarnya, semua proses politik yang terjadi di negara manapun tidak akan dapat melepaskan diri dari unsur komunikasi politik. **Gabriel Almond (1960)** mengategorikan komunikasi politik sebagai satu dari empat fungsi *input* sistem politik. Komunikasi politik telah menyebabkan bekerjanya semua fungsi dalam sistem politik. **Alfian (1991)** mengibaratkan komunikasi politik sebagai sirkulasi darah dalam tubuh. Bukan darahnya, tetapi apa yang terkandung di dalam darah itu yang mendorong sistem politik itu hidup. Komunikasi politik, layaknya darah, mengalirkan pesan-pesan politik berupa tuntutan, protes, dan dukungan (aspirasi dan kepentingan) ke (jantung) pusat pemrosesan sistem politik. Hasil pemrosesan itu melahirkan kesimpulan

berupa *output* yang dilahirkan lagi menggunakan saluran komunikasi politik menjadi *feedback* dalam sistem politik.

Komunikasi politik menyambungkan semua sistem yang ada pada sistem politik, termasuk sistem politik masa kini dan masa lampau. Oleh karena itu, aspirasi dan berbagai kepentingan dari semua *stakeholder* politik dapat tersampaikan dan melahirkan berbagai kebijakan. Apabila komunikasi politik berjalan lancar, wajar, dan sehat, maka sistem politik akan mencapai tingkat responsif yang tinggi terhadap perkembangan aspirasi dan kepentingan rakyat serta tuntutan perubahan jaman.

Komunikasi politik membantu sistem politik mulai dari penanaman nilai (sosialisasi politik atau pendidikan politik) sampai pada pengartikulasian dan penghimpunan aspirasi dan kepentingan, kemudian pada proses pengambilan kebijaksanaan, pelaksanaan, dan penilaian terhadap kebijakan tersebut.

Gambar 8.1
Peran Komunikasi Politik dalam Sistem Politik



Gambar diolah dari Alpian(1991)

Lebih jauh dapat digambarkan peranan penting komunikasi politik dalam memelihara dan meningkatkan kualitas kehandalan suatu sistem politik yang sudah mapan. Komunikasi politik berperan penting dalam memelihara dan mengembangkan budaya politik yang ada dan berlaku serta sudah menjadi landasan yang mantap dalam sistem politik yang mapan dan handal. Komunikasi politik mentransmisikan nilai-nilai budaya politik yang bersumber dari

pandangan hidup atau ideologi bersama masyarakatnya kepada generasi baru dan memperkuat proses pembudayaannya dalam diri generasi yang lebih tua.

Menurut Alfian (1991), budaya politik juga lahir dari sistem politik yang dianut oleh setiap negara masing-masing. Dalam budaya politik yang berbeda-beda bergantung dari sistem politik masing-masing negara melahirkan sifat komunikasi politik yang berbeda-beda pula. Dalam sistem politik otoriter/totaliter dengan ideology tertutup sifat komunikasi politik satu arah, yaitu dari atas ke bawah, dari penguasa ke masyarakat dalam bentuk **indokrinatif**. Komunikasi politik yang bersifat indokrinatif ini tercermin dalam proses sosialisasi politik masyarakatnya. Kebenaran ideologi menurut penafsiran penguasa yang memonopolinya tidak dapat dibantah. Masyarakat merasa tidak berdaya untuk mengutarakan pandangan, pemikiran, pendapat, aspirasi dan kepentingan mereka yang murni. Penguasa mendominasi dan mengontrol semua jaringan politik, baik dalam fungsi-fungsi input maupun output. Komunikasi politik berperan sebagai alat kekuasaan yang efektif dan ampuh. Realitas itu tercermin pada pemerintah Fasisme Nazi Jerman dibawah Hitler dan Komunis Rusia dibawah Stalin.

Sistem politik yang anarkis biasa lahir karena belum membudayanya ideologi bersama. Ideologi mereka masing dipersaingkan di antara golongan yang ada, sehingga terjadi persaingan dan pertentangan ideologi, rasa saling curiga, permusuhan dan primordialisme yang makin menguat. Dalam sistem politik **anarkis** lahirlah budaya politik anarkisme dalam bentuk kebebasan dan keterbukaan yang tidak terbatas dan tidak terkendali. Dalam budaya **anarkisme**, komunikasi politik tampak sangat terbuka dan bebas, tetapi sesungguhnya tidak sehat. Masing-masing golongan atau kekuatan politik menganggap dirinyalah yang paling kuat. Komunikasi secara horizontal dan timbal-balik memang terjadi, tetapi karena masing-masing saling menutup telinga, maka dialog yang sehat tidak terjadi. Isi pesan komunikasi politik penuh dengan pengagungan diri sendiri sambil saling mencela dan memburukan orang lain. Sifat komunikasi politik dalam sistem dan budaya politik anarkisme memperkuat membenaran ideologi golongan, mengutamakan aspirasi dan kepentingan masing-masing, merangsang primordialisme dan mengembangkan suasana saling mencurigai.

Dalam sistem politik demokrasi, budaya politik yang berkembang pun adalah budaya politik serba terbuka, sehingga sangat memungkinkan komunikasi politik mengembangkan dialog yang wajar dan sehat, dua arah atau timbal balik, baik secara vertikal maupun horizontal. Tidak ada yang berhak memonopoli penafsiran. Semua pihak mengembangkan pemikiran yang relevan tentang ideologi bersama mereka. Semua merasa sama-sama memiliki.

Hal itu berlaku pula dalam komunikasi politik. Suatu sistem politik akan berjalan lancar jika komunikasi politik berjalan lancar. Komunikasi politik akan efektif jika dapat menekan, bahkan menghilangkan *noise* (hambatan) dalam bentuk unsur-unsur budaya yang berbeda atau menyelaraskan dengan budaya yang hidup dalam negara penganut **sistem politik tertentu**. Apalagi pada kehidupan bangsa Indonesia yang memiliki karakter budaya majemukitas, penyelarasan pesan atau bungkusan pesan dalam komunikasi politik menjadi salah satu langkah efektif guna “melanggengkan” sistem politik.

Berdasarkan catatan historis, hal tersebut sudah direalisasikan dalam kehidupan politik Indonesia. Langkah-langkah komunikasi politik di antaranya terjadi dalam berbagai catatan peristiwa sebagai berikut :

1. Pada zaman rezim Orde Baru yang berada dalam kondisi struktur politik sentralistik, otoriter, dan pemegang mayoritas tunggal, pihak rezim senantiasa membungkus kekuasaannya dengan jargon “pembangunan”. Pihak Rezim tahu benar bahwa rakyat memiliki **nilai-nilai budaya yang “manut” kepada pemimpin** dan rela berkorban bergotong royong untuk kepentingan “pembangunan” bersama. Rakyat yang tidak mendukung rezim lantas ditakut-takuti dengan dituduh sebagai kelompok anti pembangunan. Pihak rezim tahu benar bahwa dalam masyarakat memiliki **struktur paternalistik** yang kuat dengan para tokoh lokal, baik dari tokoh agama ataupun dari tokoh adat. Pihak rezim memanfaatkan para tokoh lokal ini sebagai *encoder* atas pesan-pesan “pembangunan” dari pihak rezim untuk masyarakatnya, dengan menggunakan pendekatan agama atau pendekatan adat.
2. Budaya paternalistik menjadi *bungkus* komunikasi politik bagi penguasa rezim Orde Baru untuk menanamkan nama Soeharto menjadi penguasa tunggal di Republik ini. Pesan diluncurkan bahwa Soeharto masih keturunan Sultan Yogyakarta, sehingga seluruh rakyat di Yogyakarta khususnya, di Jawa umumnya *manut* terhadapnya. Rezim Orde Baru pun, menanamkan namanya di seluruh hati rakyat Indonesia dengan mewajibkan memasang fotonya di seluruh instansi pemerintah sampai tingkat rendah, sehingga rakyat Indonesia menganggap Soeharto adalah rajanya yang harus disembah. Sebagian besar masyarakat Indonesia masih terpengaruh oleh budaya masa kerajaan, bahwa titah raja adalah hukum. Soeharto pun menancapkan namanya sebagai “pahlawan” memberantas PKI yang telah membunuh para jenderal pada peristiwa G30SPKI dan ia penerima Supersemar, padahal sejarah itu banyak yang mempertanyakan. Penanaman nama pada rakyat adalah komunikasi yang efektif untuk melanggengkan sistem politik otoriter, termasuk paham-paham politik yang lainnya. Dulu, orang-orang kulit putih di Amerika Serikat mengganti nama-nama orang kulit hitam yang mereka kuasai, Bangsa Yahudi mengganti nama tempat dan nama jalan di seluruh Palestina, **masyarakat Timor-Timur tidak mau mempertahankan Timor Timur**, tetapi menggantinya dengan Timor Leste, Wali Songo setiap menerima muafak banyak mengganti nama mereka dengan nama kearab-araban, dan berbagai pelabelan lainnya, semuanya adalah pesan komunikasi politik.
3. Kampanye politik yang efektif terhadap rakyat Indonesia ternyata bukan kampanye melalui media massa, tetapi kampanye dengan mendatangi para tokoh yang berpengaruh di masyarakat atau para kepala keluarga. Para politikus rutin mengunjungi para ulama di pesantren-pesantren besar, seperti yang dilakukan Golkar, sehingga menjadi partai terbesar. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua dimenangkan oleh calon yang dekat dengan para kepala adat. Budaya paternalistik selalu jadi sandaran komunikasi politik para politikus.
4. Pada zaman rezim Orde Baru muncul pesan politik penjulukan (*labeling*) terhadap pihak-pihak yang tidak mereka sukai atau dianggap status quo, seperti : PKI,

ekstrem kiri, ekstrem kanan, GPK, PRD, anti-Pancasila, subversive, dll. Penjulukan tersebut menjadi pesan yang sangat efektif sebagai doktrin politik terhadap pihak-pihak yang menentang berlakunya sistem politik otoriter. Pesan tersebut dibungkus dengan bumbu makar, merongrong keamanan negara, dan tindakan-tindakan yang dalam *frame* budaya masyarakat Indonesia adalah kejahatan yang tidak dapat dimaafkan.

5. Pada saat rezim Orde Baru ingin dipandang oleh rakyat dan dunia bahwa mereka memiliki keberpihakan kepada sektor pertanian dan pedesaan yang memang faktanya merupakan kelompok mayoritas dari rakyat negeri ini, maka dengan pendekatan serupa pihak rezim menggenjot sumberdaya rakyat pedesaan untuk mendukung “pembangunan” pertanian, sehingga rakyat “rela” (berdiam karena tidak bisa protes) harus secara seragam menanam komoditas yang diwajibkan oleh pihak pemerintah, yaitu padi. Rakyat pun berdiam saja pada saat tanamannya dicabuti pihak rezim karena yang ditanamnya bukan padi. Selain jargon pembangunan, pihak rezim membungkus pesan kekuasaannya dengan jargon “persatuan dan kesatuan”. Untuk ini, mereka senantiasa mendengarkan moto: “selaras, serasi dan seimbang”. Dalam seni musik, selaras artinya satu laras (contohnya laras pelog, atau laras salendro). Maknanya secara politik bahwa rakyat harus satu suara dengan pihak rezim. Mereka yang berbeda suara dianggap anti persatuan dan kesatuan bangsa.
6. Pada masa reformasi, kelompok partai Islam mengecam Megawati jadi presiden. Mereka mengusung pesan “budaya Islam” yang melarang wanita menjadi pimpinan (imam). Padahal, pesan yang sebenarnya, mereka ingin menurunkan Megawati dari kursi kepresidenan.
7. Setiap pimpinan partai yang menghendaki dukungan rakyat selalu membungkus pesan mereka dengan kebiasaan berpakaian mereka. Banyak, politikus ketika berkampanye ke pesantren menggunakan peci (kopiah) dan ketika ke keraton menggunakan blangkon, bahkan ketika ke Bali, Megawati diisukan ikut menyembah patung Hindu.
8. Begitu pula pada era pemilihan pimpinan secara langsung, baik dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, maupun pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, maka komunikasi politik para kandidat pun dituntut untuk dapat langsung kepada rakyat pemilih.

Realitas-realitas tersebut akan terus berkembang, sehingga kajian komunikasi politik akan terus dinamis karena akan menjadi bagian dari perkembangan sistem politik dan budaya politik yang berkembang di suatu Negara, termasuk di Indonesia. Oleh karena itu, kajian komunikasi politik ke depan akan terus menjadi bagian dari trend Ilmu Komunikasi. ***

DAFTAR PUSTAKA

- Abcarian , G. dan George S.M. *Contemporary Political Systems*. Charles Scribner's Sons'. News York.
- Absori dkk. (2012) Pemilihan Kepala Daerah: Studi Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Gabungan Di Kalimantan Selatan. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15, No. 1, Maret 2012: 1-15
- Adi, I.R. (1994). *Psikologi Pekerjaan dan Ilmu Kesejahteraan Sosisl*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Affandi, M. (2017). *Komunikasi Propaganda Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Deepublish
- Ahmadi, D. dan Nova Y. (2007). *Kekerasan di Televisi: Perspektif Kultivasi*. Bandung: Mediator Vo. 8 No. 1 Tahun 2007
- Alfian. (1991). *Komunikasi Politik dan Sistem Politik di Indonesia*. Jakarta: Gramedia
- Almon, G.A. and James C. (1960). *The Politics of The Developing Areas*. Princeton: Princeton University
- Almond, G.A. dan Sidney V. (1984). *Budaya Politik: Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*. Bina Aksara. Jakarta.
- Ali, N. (1999). *Peradaban Komunikasi Politik*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Al Muchtar, S. (2000) *Pengantar Studi Sistem Politik Indonesia*. Bandung. Gelar Pustaka Mandiri.
- Amirudin dan A. Zaini B. (2006). *Pilkada Langsung: Problem dan Prospek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Anderson, B. (1972). *The Idea of Power in Javanese Culture*, Equinox Publishing, Jakarta
- Anderson, J.A. (1996). *Communication theory: epistemological foundations*. New York, NY: The Guilford Press.
- Apter, D.E. (1985). *Pengantar Analisa Politik*. Jakarta:LP3ES
- Ardianto, E. dkk. (2007). *Komunikasi Massa: Suatu Pengantar*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- Arifin, A. (1992). *Komunikasi Politik dan Pers Pancasila*, Jakarta : Media Sejahtera
- (2003). *Komunikasi Politik: Paadigma Teori-Aplikasi-Strategi dan Komunikasi Politik di Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

- Arif , A. R. (2006). *Mengawal Demokrasi, Dinamika Pilkada Kabupaten Grobogan*. Surakarta, Indonesia : Iskra Publisher.
- Atkin, C.K. (1981). *Communication and Political Socialization*, Pp. 299-328, in Nimmo, dan D. And
- Azwar, S. (1997). *Reliabilitas dan Validitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Baran, S. J., dan Dennis K.D. (2010). *Mass Communication Theory : Foundations, Ferment, and Future* (5th ed), terj. Afrianto Daud, dan Putri Iva Izzati. Jakarta : Salemba Humanika.
- Bandura, A. (1977). *Social Learning Theory*. New Jersey: Prentice Hall, Inc., Englewood Cliffs.
- Bang, H.P. (2003). *Governance and Political Communication*. New York: Manchester University Press
- Barret, O.B. dan Peter B. (eds). (1987). *Media, Knowledge and Power*. London & Sidney: Croom Helm in Association with the Ohm University.
- Becker, L.B. (1975). *The Development of Political Cognition*. In Steven H.
- Berlo. D.K. (1960). *The Social Contract*. New York: Atheneum Publishers
- (1974). *Process of Communication: An Introduction to Theory and Practice*. New York: Holt Rinehart and Winston, Inc.
- Bima, K. dkk. (2018). *Teori Konflik : Sebuah Kajian Menuju Pemikiran Ralf Dahrendorf*. Surakarta: Fisip. Universitas Sebelas Maret
- Biocca, F. A. (1998). *Opposing Conceptions of the Audience: the Active and Passive*
- Bittner. John R. (1980). *Mass communication, an Introduction*. Prentice-Hal
- Blalock, H.M. (1972). *Social Statistics*, Kogakusha: McGraw Hill.
- Blake, R.R., & Mouston, J.S.. (1964). *The Managerial Grid*. Houston, TX: Gulf Publishing Company.
- (1991). *Leadership dilemmas : Grid Solutions*. Houston, TX: Gulf Publishing Company.
- Bluhma, W.T. (1981). *Theories of Political System: Classies of Political Thought and Modern Political Analysis*, Third Edition, New Delhi: Prentice-Hall of India Private Limited
- Blumer, H. (1952). *Symbolic Interactionism: Perspective and Method*. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall
- Brecht, A. (1970). *Political Theory, The Foundation of Twentieth Century Political Thought*. The Times of India Press, Bombay

- Brownhill, R. dan Patricia S. (1989). *Political Communication: Issue and Strategies for Research*, California: Sage Publication
- Budiardjo, Miriam, (1992). *Partisipasi dan Partai Politik*, Sebuah Bunga Rampai, PT. Gramedia, Jakarta, 1982
- Budiardjo, Miriam, (1995). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Budiardjo, Miriam. dan Ibrahim A.. (1995). *Fungsi Legislatif dalam Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Raja Frafindo
- Burgoon, J. K., Buller, D. B., & Woodall, W. G. (1989). *Nonverbal communication: The unspoken dialogue*. New York: Harper & Row.
- Catlin, E.G. (1969) "*Political Theory: What Is It?*" dalam James A. Gould dan Vincent V. Thursby, ed., *Contemporary Political Thought, Issues in Scope, Value and Direction*, Holt, Rinehart and Winston, Inc.
- Chaffee, S.H. (1975). *Political Communication: Issue and Strategies for Research*, California: Sage Publication
- Cohen, R. (1963). *Ethnicity: Problem and Focus in Anthropology* dalam BJ Siegel, A.R. Beals, dan S.A Tyler, ed *Annual Review of Anthropology*
- Cohen, B.C. (1963). *The Press and Foreign Policy*. New Jersey: Princeton University Press
- Coser, L. A. (1956). *The Functions of Social Conflict*. New York: The Free Press
- Coser, T. dan Anthony Rosenberg. (1976). *An Introduction to International Politics*. New Jersey: Prentice Hall
- Croisannt, A. et.al. (2008). *Politik Pemilu di Asia Tenggara dan Asia Timur*. Jakarta: Pensil-324 dan Freedrich Ebert Stiftung
- Dahlan, M. A. (1999). *Komunikasi di Tahun 2000: Masih Perlukah Media Film?*
- Dance, F.E.X. (1967). *Human Communication Theory.: Original Essays*. New York: Holt, Rinehart, Winston
- Danial, A. (2009). *Iklan Politik: Modernisasi Kampanye Politik Pasca Orde Baru*. Yogyakarta: LKiS
- Darmawan, C. (2016). *Melantik Pemimpin Daerah*. Bandung: Pikiran-Rakyat, 17 Februari 2016
- DeFleur, M.L. (1970). *Theories of Mass Communication*. New York: David McKay
- , dan S. Ball R. (1975). *Theories of Mass Communication*, 3th ed. New York: David McKay.

- Depari, E. (1982). *Peran Komunikasi Massa dalam Pembangunan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Devito, J.A. (1994). *Human Communication*. Harper: The Basic Course
- Dofivat, E. (1968). *Handbuch der Publizistik*. Berlin: Walter de Gryter
- Duverger, M. (1982). *Sosiologi Politik*. Jakarta: Rajawali Press. Parsons, 19 51. *The Social System*. New York, Free Press. Terjemahan Somardi, ISI Jawa Barat, 1995.
- Easton, D. (1992). *Approaches to The Study of Politics*. New York: Macmillan Publishing Company.
- Elvinaro, Ardianto. (2007). *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*. Bandung : Simbosa Rekatama Media
- Effendy, O. U. (1993). *Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: Citra Adiya Bakti
-2000. *Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Emmerson, D.K. (1976). *Indonesia's Elite: Political Culture and Cultural Politics*. London: Cornell University Press, 1976.
- Evra, Judith Van. (1990). *Television and Child Development*. Jersey & London: Lawrance Erlbaum Associates Publisher
- Fisher, B.A. (1986). *Teori-Teori Komunikasi*. Bandung: Remadja Karya
- Fisher, S.et.all. (2000). *Mengelola Konflik, Ketrampilan dan Strategi untuk Bertindak*. Jakarta: The British Council, Indonesia.
- Fukuyama. (1999). *The Great Disruption: Human Nature and Reconstitution of Social Order*. . New York: Free Press
- Gerbner, G. (1967). *International Encyclopedia of Communications*. New York: Oxford Univ. Press
- Geertz, C. (1981). *Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*. Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya dan Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial
- Gerungan, W.A. (2000). *Psikologi Sosial*. Bandung : Refika Aditama.
- Gibson, I, Donnely. (1996). *Organisasi, Perilaku, Struktur Proses*
- Ghai, Y. (2000). *Demokrasi dan Konflik yang Mengakar: Sejumlah Pilihan untuk Negosiator*. International Institute for Democracy and Electoral Assistance, (International IDEA): Jakarta

- Goble, F.G.. (1985), *Mazhab Ketiga: Psikologi Humanistik Abraham Maslow (terjemahan)*, Kanisius, Yogyakarta.
- Goffman, Erving. 1959. *The Presentation of Seelf in Everyday Life*. Jakarta: Erlangga.
- Graber, D. A. (1984). *Processing the News: How People Tame the Information*. New York
- Harahap, A.A. (2005). *Manajemen dan Resolusi Konflik Pilkada*. Jakarta: Pustaka Cidesindo
- Harahap, K. (2004). *Konstitusi Republik Indonesia*. Bandung: PT Grafitri Budi Utami
- Haryanto. (2006). *Sistem Politik: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty
- Hasibuan, H.M.S.P. (1996). *Organisasi dan Motivasi Dasar Peningkatan Produktivitas*. Jakarta: Bumi Aksara
- Harun, R. dan Sumarno A.P. (2006). *Komunikasi Politik*. Bandung: Mandar Maju
- (2006). *Komunikasi Politik sebagai Suatu Pengantar*. Bandung: Mandar Maju.
- Hikmat, M.M. (2005). *Efek Berita Politik Media Cetak pada Perilaku Politik Anggota DPRD Jawa Barat dalam Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2003*: Tesis Program Pasacasarjana Universitas Padjadjaran
- (2010). *Komunikasi Politik dalam Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2008*. Disertasi. Program Pascasarjana Universtitas Padjadjaran Bandung
- (2011). *Etika dan Hukum Pers*. Bandung: Batic ICM Press
- (2017). *Kampanye Jitu dalam Pilkada Langsung*. Bandung: JMPD Press
- Herbert, B. (1969) *Symbolic Interactionism: Perspektif and Method*, (New Jersey: Harper and Row, 1969), h. 71
- Hobbes, Th.. (1951). *The Matter Forme and Power of Commonwealth Ecclesiastical and Civil*. Oxford; Basil Blackwell
- Hovland, C.I., Janis, I.L., dan Kelley. 1953. *Communication and persuasion*. New Haven: Yale University Press
- Huntington, S.P. (1983). *Tertib Politik dalam Masyarakat Politik Sedang Berubah*. Jakarta: CV Radjawali
- Huntington, S.P. dan Joan M. Nelson. (1994) *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Penerjemah Sahat Simamora. Jakarta: Rineka Cipta
- Johannesen, Richard L., (1996). *Ethics in Human Communication (Third Edition)*, Terj. Dedy Jamaluddin Malik dan Dedy Mulyana, *Etika Komunikasi*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya

- J. V. Evra, *Television and Children Development* (New Jersey: Lawrences Erlbaum, 1990).
- Kantaprawira, R. (1988). *Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar*, Bandung: Sinar Baru 1990
-(1991). *Pendekatan Sistem dalam Ilmu-Ilmu Sosial: Aplikasi dalam Meninjau Kehidupan Politik Indonesia*, Bandung: Sinar Baru
- Katz, E., Jay G. Blumler, Michael G.. (1974). Uses and gratifi cation research. *The Public Opinion Quarterly*, Vol. 37, No. 4. (Winter, 1973-1974), h. 509-523.
- Koentjaraningrat. (1984). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru
- Kooiman, Jan. (1993), *Modern Governance : New Government-Society Interaction*, Sage Publication, London
- KPU Provinsi Jawa Barat. 2008. Laporan Akhir Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2008. Bandung: KPU Provinsi Jawa Barat
- KPU Provinsi Jawa Barat. 2018. Laporan Akhir Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018. Bandung: KPU Provinsi Jawa Barat
- KPU Provinsi Jawa Barat. 2009. Laporan Akhir Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Bandung: KPU Provinsi Jawa Barat
- Laswell, H. (1948). *The Structure and Function of Communication in Siciety, The Communication of Iedal.*, L. Bryson, editor. New York: Institute for Religious adn Social Studies
-(1971). *Preview of Policy Sciences*, New York: American Elsevier Publishing Co., 1971
- Leonard, D. (1940). *Propaganda: Its Psychology and Technique*
- Liliweri, A. (1994). *Perspektif Teoretis Komunikasi Antar-Pribadi*. Bandung: Citra Aditya Bhakti
- (1991). *Memahami Peran Komunikasi Massa Dalam Masyarakat*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Littlejohn, S.W. (1996). *Theories of Human Communication*. California USA: Wardsworth Publishing Company
- Mac G. J. and Jack W. P. (1966). *Government by The People*. New Jersey: Prentice-Hall
- Magill, Frank N. (eds). *International Encyclopedia of Government and Politics*. Singapore: Toppan Company PTE LTD, 1996.
- Manurung, T.M, Gerald R., and Mark S. (1975), *Between People, A New Analysis of Interpersonal Communication*, Science Research Associates Inc., Chicago.
- [McLuhan, M.](#) (1971). *The Medium is the Massage*. Penguin Books: New York

- McQuail's, D., (2001), *Mass Communication Theory*, London. 4th edition: SAGE Publications, Inc.
- (2011), *Teori Komunikasi Massa* (Edisi 6). Jakarta: Salemba Humanika
- McCombs, M. E & Donald L.S. (1972). *The Agenda-Setting Function of Mass Media*. Oxford: Public Opinion Quarterly Vol 36
- Malik, D. D. (1998) *Gejolak Reformasi Menolak Anarki: Kontroversi Seputar Aksi Mahasiswa Menuntut Reformasi Politik Orde Baru*, Bandung: Zaman Wacana Mulia
- Mariana, D. (2015). *Pemimpin Visioner*. Bandung: Pikiran Rakyat, 23 Juli 2015 Yusuf, Asep Warlan. 2015.Kualitas Pilkada. Bandung: Pikiran Rakyat, 31 Oktober 2017
- (2008). [Dinamika demokrasi & perpolitikan lokal di Indonesia](#). Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (API) Bandung bekerjasama dengan Puslit KP2W Lembaga Penelitian Unpad
- Marikanto T. (2010) *Komunikasi Pembangunan*. LPP UNS
- Mashad, D. dkk. (2005). *Konflik Antar Elit Politik Lokal dalam Pilkada*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Maslow, A. H. (1970). *Motivation and Personality*. USA: Harper and Row Publication
- Mas'ood, M. dan C.M.A. (1977). *Perbandingan Sistem Politik*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- McQuail, D. (1994). *Teori Komunikasi Suatu Pengantar*. Edisi kedua. Jakarta; Erlangga.
- (1992) "Political Communication" dalam Maurice Kogan (ed), *Encyclopedia of Government and Politics Vol. 1*. (London: Routledge, 1992), h 472-473.
- Meadow, R.G. (1980). *Politics As Communication*, (Noorwod, NJ: ABLEX Publishing Company, 1980), h 4.
- Mc Nair, Brian. (1999). *An Introduction Political Communication*. London: Library Cataloguing in Publication
- Megawangi, R.. (2010). [Keluarga dan Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dalam Rangka Menyongsong Abad Ke XXI](#). Bogor: Bogor Agricultural University
- Menkopolkam. (2006). *Pilkada: Dalam Sistem Demokrasi Indonesia*. Jakarta: Program Pemantapan Keamanan Dalam Negeri
- Merriam, C. (1942). *Systematic Politics*. Chicago: University of Chicago Press
- Miller, K. (2002). *Communication Theories, Perspective, Processes, and Contexts*.

Boston: McGraw – Hill.

- Mills, C.W. (1958). *The Power Elite*. Alfred S Knopf: New Jersey
- Miller, G.R. And H.E. Nicholson. (1976). *Communication Inquiry: A Perspective on a Process*. Reading, Massachusetts: Addison Westley
- Mosco, V. (1996) *The Political Economy of Communication*. Sage Publication:New York
- Mueller, D. J. (1996). *Mengukur Sikap Sosial*. Terjemahan Eddy Suwardi Kartawidjaja, Jakarta : Bumi Ak-sara.
- Mulyana, D. (2000). *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- 2001. Deddy Mulyana. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- 2007. *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- (2008). *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- 2010. [Komunikasi lintas budaya: pemikiran perjalanan dan khayalan](#). Bandung: Remaja Rosdakarya
- (2013) *Komunikasi Politik, Politik Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013..
- Muhtadi, A. S. (2002). *Dinamika Komunikasi Politik NU*. Disertasi. Bandung: PPS Unpad
- (2008). *Kampanye Politik*. Bandung: Humaniora
- **2008. Komunikasi Politik Indonesia: Dinamika Islam Politik Pasca-Orde Baru**. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nasution, Z. (1990). *Komunikasi Politik: Suatu Pengantar*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Ndraha, T. (1997). *Metode Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Nimno, D. (1978). *Political Communication and Public Opinion in America*. California: Goodyear Publising Company Santa Monica
- (1989). *Komunikasi Politik*, terjemahan Tjun Surjaman, Bandung: Remadja Rosdakarya
- 2011. *Komunikasi Politik (Komunikator, Pesan, dan Media)*. Jalaluddin Rakhmat (penyunting). Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nindito, S. (2005). *Fenomenologi Alfred Schutz: Studi tentang Konstruksi Makna dan Realitas dalam Ilmu Sosial*. Jurnal Ilmu Komunikasi. Volume 2 Nomor 1, Juni 2005: 79-94

- Noelle, R. N, Elisabeth (2009). "Spiral of Silence". Dalam West, Richard; Turner, Lynn. *Introducing Communication Theory: Analysis and Application*. McGraw-Hill
- Noviardi, ,Laode Imam Toffani (2011) *Interaksi Simbolik George Herbert Mead* ,(Online), (<http://Reviewkomunikasi.Blogspot.Com>). <http://www.Fahmi zolla.Blogspot.com>
- Norris, P. (2004). *Campaign Communications*. Lawrence LeDuc, Richad Niemi, dan Pippa Norris (eds). *Comparing Democracies 2: Election and Voting in Global Perspective*. SAGE
- Rogers, E.M. (1994). ***A History of Communication Study: A Biographical Approach***. New York: The Free Press
- Rudy, M.T. (2005). *Komunikasi dan Humas Inbternasional*. Bandung : Refika Aditama.
- Elisabeth, N.N. (2009). "Spiral of Silence". Dalam West, Richard; Turner, Lynn. *Introducing Communication Theory: Analysis and Application*. McGraw-Hill Education
- O'Keefe, G.J. (1975). *Political Compaigns and Mass Communication Research*. California: Sage Publication, Inc
- Pace, R. W. and Don F. F. (2000). *Komunikasi Organisasi*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Palmquis, S. (2002). *Pohon Filsafat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Parsons, T. (1951) *The Social System*. Glencoe III: Free Press.
- Patterson, K. (2003). *Servant leadership: a theoretical model*. *Proceeding, Servant Leadership Roundtable*. Virginia Beach: Regent University.
- Pawito. (2009). *Komunikasi Politik: Media Massa dan Kampanye Pemilihan*. Bandung: Jalsutra
- Permana, S. (2006). *Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat*. Bandung: KPU Jabar
- Prihatmoko, J.J. (2005). *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Pohan, A. (2006). *Gender dalam Komunikasi Politik Aktivis Partai Islam*. Disertasi. Bandung: PPS Unpad
- Rakhmat, J. (1998). *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- (2000). *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- (2008). *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Rahardjo, Satjipto . (1986), *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung. Shannon, Claude E. & Warren, Weaver.1949 *A Mathematical Model Of Communication*. Urbana, IL : University of Illinois Press.

- Ramadhan, Dian Taufik. 2000. Resolusi Konflik Antara Masyarakat Lokal Dengan Perusahaan Pertambangan (Studi Kasus: Kecamatan Naga Juang, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara). *Jurnal Ilmu Lingkungan* Volume 12 Issu 2: 92-104 (2014)
- Rauf, M. (2000). *Book Review Teori-Teori Politik*. Jakarta: Pasacasarjana Ilmu Politik UI
- Reilly, B. dan Andrew Reynolds. (2001) *Sistem Pemilu*, IDEA International Stockholm, United Nations New York, dan IFES Washington DC
- Reynolds, A. dkk, *Electoral System Design: The New International IDEA Handbook* (Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2005) hal.9-14
- Ritzer, G. & Douglas J.G.. (2003) *Teori Sosiologi Modern*. Edisi ke-enam. Jakarta: Kencana
- (2014) *Teori Sosiologi*. Bantul: Kreasi Wacana
- Russel, Bertrand. (1988). *Kekuasaan : Sebuah Analisis Sosial Baru*. Jakarta: Yayasan Obor Indoensia
- Saad, M.M. (2003). *Sejarah Konflik antar Suku di Kabupaten Sambas*. Pontianak: Kalimantan Persada Press
- Salosa, D.S. (2005). *Mekanisme, Persyaratan, dan Tata Cara Pilkada Langsung*. Yogyakarta: Media Presindo
- Sanit, A, (1977), *Partai, Pemilu, dan Demokrasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- (1985). *Perwakilan Politik di Indonesia*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Sastropoetro, S. (1984). *Komunikasi Internasional, Sarana Interaksi Antar-Budaya*. Bandung: Alumni
- Sears, D.O., Freedman, Jonathan L., & Peplau, L. A. (1994). *Psikologi Sosial jilid 2*. Alih Bahasa: Michael Adryanto. Jakarta: Erlangga.
- Semiawan, C.R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta. Grasindo. Tahun 2010. Hal 88-89
- Setioyo, B. (2008). *Iklan dan Politik: Menjaring Suara dalam Pemilihan Umum*. Jakarta: AdGoal.Com
- Schramm, W. (1974). *How Communication Work*. New York: Ramdon House
- (1977). *The Process and Effects of Mass Communication*. Urbana: University of Illion Press
- Scheidel, Thomas M. 1976. *Speech Communication and Human Interaction*. Glenville, Ill: Scott, Foresman & Co.

- Sinaga, J. (2003). *Pers Nasional*. Jakarta: Yayasan Pengelola Pers
- Sinaga, Kartorius. (2003). *Pemilihan Kepala Daerah Langsung Kota dan Kabupaten: Beberapa Catatan Awal*. Dalam Abdul Gaffar Karim (Ed). *Kompleksitas Persoalan Ekonomi di Indonesia*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Sjamsuddin, N. (1993). *Dinamika Sistem Politik Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Smith, Edward C. (1983). *Sejarah Pembredelan Pers di Indonesia*. Jakarta: Grafitri Pers
- Smith, A. (1776). "An Inquiry into the Nature of Causes of the Wealth of Nations" dalam Mark Skusen (2005); Sang Maestro Teori-teori Ekonomi Modern, Jakarta Prenada.
- Soekanto, S. (1983). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soeprapto, R. (2002). *Interaksi Simbolik, Perspektif Sosiologi Modern*. Yogyakarta: Averpres Press dan Pustaka Pelajar.
- A.P., Sumarno (1989). *Dimensi-Dimensi Komunikasi*. Bandung: Citra Aditya Bhakti
- Surbakti, R. dkk. (2008) *Perekayasaan Sistem Pemilihan Umum Untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis, Partnership for Governance Reform Indonesia*, Jakarta 2008.
- Susanto, A.S. (1975). *Pendapat Umum*. Jakarta: Bina Cipta
- (1976). *Filsafat Komunikasi*. Jakarta: Bina Cipta
- (1982). *Komunikasi Massa I*. Bandung: Bina Cipta
- (1986). *Filsafat Komunikasi*: Bandung: Binacipta
- Suseno, F.M.. (2003). *Etika Politik*. Jakarta : Gramedia
- Susilo, M.E. (2000). *Pemberitaan Pers Selama Masa Kampanye*. Tesis. Bandung: Program Pascasarjana Universitas Padjadajaran
- Suryadi, K. (2006). *Kedudukan Platform dan Komunikasi Politik Kiai dalam Membentuk Identifikasi Kepartaian*. Disertasi. Bandung: PPS Unpad
- (2009). *Balihocracy*. Bandung: Pusat Studi Agama dan Pembangunan
- SP. Varma. (2001). *Teori Politik Modern*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soewardi, H. (2004). *Filsafat Ilmu, Induk Sains Empirikal*. Bandung : Bakti Mandiri
- Syam, N.W. (1997/1998). *Filsafat Komunikasi*. Bandung: PPS Unpad
- Syafeii, I. K. (2008). *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Refika Aditama

- Tan, S.A. (1981). *Mass Communication Theories and Research*. Ohio: Gird Publishing, Inc.
- Thevenaz, Pierre. (1962). *What is Phenomenology?* Chicago: Quadrangle Books
- Thoha, M. (1990). *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Press
- . 2002. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Thomas, J.M. and Warren G.B. (1972). *Management of change and Conflict*. Australia: Penguin Book
- Tinarbuko, S. (2009). *Iklan Politik dalam Realitas Media*. Bandung: Jalasutra
- Trent , J., S, Robert V. Friedenberg, and Robert E. Denton, Jr. (2011) [Political campaign communication : principles and practices.](#) Lanham : Rowman & Littlefield Publishers
- Tubbs, S. L. & Silvia M..(1978). *Human Communication*. New York: McGraw-Hill
- . (2001). *Human Communication*. Bandung : Remaja rosda karya.
- Tuhana, T.A. (2000). *Konflik Maluku*. Yogyakarta: Gama Global Media.
- Venus, A. (2004). *Manajemen Kampanye; Panduan Teoritis Dan Praktis Dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi*. Bandung: Simbiosis Rekaatam Media.
- Wayne, P.R. & Don F. Faules. (2005). *Komunikasi Organisasi Strategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan*
- Weber, Max. (1979). *Economy And Society : An Of Interpretive Sociology, And Power*, Mc-Graw Hill Book Company Limited, London.
- Wibisono, D. (2006). *Manajemen Kerja*. Jakarta: Erlangga.
- Widjaya, A. (1988). *Budaya Politik dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: LP3S
- Wiendijarti, Ida. (2008). *Pengaruh Kredibilitas Narasumber Berita Politik Terhadap Internalisasi Nilai Berita Politik Pada Masyarakat*. Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 6, Nomor 2, Mei - Agustus 2008
- Wilson, T.D. 2002. *Alfred Schutz, Phenomenology and Research Methodologi for Information Behavior Research*. ISIC
- Winardi. (1992). *Manajemen Perilaku Organisasi*. Bandung: PT Citra Aditya Bhakti
- Wright, C.R. (1988). *Mass Communication A Sociological Perspective*. New York: Ramdon Haouse
- Zeitlin, I.M. (1998). *Memahami Kembali Sosiologi : Kritik terhadap Teori Sosiologi Kontemporer*. Jogjakarta : Gadjah Mada University

Zuhro, Siti. 2009. *Demokrasi Lokal: Peran Aktor dalam Demokratisasi di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Bali*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2009.

Sumber Lain:

1. 50 Tahun Pengabdian DPRD Propinsi Jawa Barat
2. Jawa Barat dalam Angka 2003
3. Risalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2003-2008
4. Lintas Sejarah DPRD Provinsi Jawa Barat 1945 - 2014
5. Harian Umum Pikiran Rakyat
6. Harian Umum Galamedia
7. Harian Umum Metro Bandung
8. Harian Umum Kompas
9. Detik.Com
10. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
11. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1975 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah
12. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
13. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
14. Peraturan KPI No. 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran
15. Peraturan KPI No. 2 Tahun 2012 tentang Standar Program Siaran
16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
17. Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Pers Nasional
18. Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
19. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Penyelenggara Pemilu
20. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah



MAHI M. HIKMAT,
Doktor Komunikasi Politik
Universitas Padjadjaran
(UNPAD) Bandung. Saat ini,
ia mengajar di UIN Bandung,
Universitas Pasundan,
dan Universitas
Komputer Bandung.
Sejak 2001, ia menggeluti
kehidupan sebagai peneliti,
seperti di Manpolhukam RI,
Menkumham RI, Pemerintah
Provinsi Jawa Barat, DPRD
Provinsi Jawa Barat,
sejumlah pemerintah
kabupaten/kota di Jawa
Barat. Ia juga menjadi
konsultan ahli beberapa
calon kepala daerah dan
calon anggota legislatif,
serta institusi lainnya.
Ia telah menghasilkan
rata-rata penelitian yang
berkaitan dengan berbagai
kehidupan sosial
kemasyarakatan
di Indonesia.

KOMUNIKASI POLITIK

DALAM PILKADA LANGSUNG

Teori dan Praktik

Kajian terhadap ilmu komunikasi tidak dapat lepas dari pengaruh kajian ilmu sosial lainnya. Perpaduan kajian ilmu komunikasi dan ilmu sosial lain menghasilkan bentuk perkembangan baru, salah satunya komunikasi politik. Komunikasi politik tidak hanya membahas proses komunikasi yang memuat pesan-pesan politik, tetapi juga membahas bagaimana komunikasi dapat berlangsung dalam suatu sistem politik atau pemerintahan. Juga bagaimana sistem itu dapat dipertahankan dan berlanjut dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Komunikasi politik merupakan salah satu bagian terpenting dalam dinamisasi sistem politik Indonesia, mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Bahkan, dapat menentukan sistem politik yang berkembang dalam pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun daerah. Komunikasi politik pun dapat berubah sesuai dengan perubahan kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan yang berkaitan dengan sistem politik.

Buku ini merupakan revisi dari Buku *Komunikasi Politik: Teori dan Praktik*. Penulis membahas lebih mendalam bagaimana komunikasi politik dalam konteks keilmuan dengan menambahkan pembahasan mengenai teori komunikasi politik, juga konteks komunikasi politik dalam realitas perubahan sistem pemerintahan, terutama pemerintah daerah. Buku ini dapat menambah khazanah berpikir dalam konteks komunikasi, politik, dan komunikasi politik bagi mahasiswa dan peminat ilmu komunikasi serta ilmu politik. Juga menjadi salah satu sumber referensi dan inspirasi bagi politikus dalam membuat strategi memenangi setiap pertarungan politik, baik di tingkat pusat melalui pemilihan umum maupun di tingkat daerah melalui pemilihan kepala daerah.

ISBN 978-602-7973-89-3



SIMBIOSA REKATAMA MEDIA

Jl. Ibu Inggit Darmasih No. 31 Bandung 40132
Telp/Fax: (022) 5208370 | WA: 099643965183
E-mail : simbiosarekatama@gmail.com (Redaksi)
siramedia@yahoo.com (Umum)
Website : simbiosarekatama.co.id

